

Hakikat & Logika Anggaran

Hakikat Anggaran:

- Andaikan ada sejumlah uang dan sejumlah kebutuhan yang akan dipenuhi dalam periode tertentu.
- Uang yang tersedia tidak akan mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan itu.
- Untuk itu ada tiga hal yang lazim dilakukan:
 1. Menentukan kapan dan kebutuhan mana yang akan dipenuhi lebih dulu dengan jumlah uang yang sudah tersedia. Selanjutnya, kebutuhan lain akan dipenuhi selama periode berjalan sambil mengumpulkan uang dari berbagai sumber.
 2. Jika menurut perkiraan uang yang mungkin dikumpulkan selama periode tersebut tetap tidak akan mencukupi, maka yang harus dilakukan adalah menetapkan kebutuhan yang akan dipenuhi pada periode yang sama.
 3. Menyesuaikan tempo pemenuhan kebutuhan dengan tempo pengumpulan uang agar seluruh kegiatan (membelanjakan dan mengumpulkan uang) dalam periode tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dimensi-dimensi Persoalan Anggaran

- Pilihan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang akan dipenuhi.
- Pilihan terhadap sumber-sumber penerimaan anggaran.
- Jangka waktu tertentu yang akan membatasi realisasi anggaran.
- Perencanaan/ penjadwalan belanja kebutuhan/ kegiatan maupun penerimaan.
- Pengukuran kinerja/ pencapaian pelaksanaan kegiatan maupun penerimaan.

Definisi Anggaran

Anggaran adalah:

Pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam sebuah rentang waktu tertentu dimasa yang akan datang serta realisasinya di masa yang lalu.

Hal-hal yang diketahui dari anggaran

- Arah kebijakan pemerintah daerah dalam hal penerimaan maupun pengeluaran.
- Pencapaian atau realisasi dari pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang direncanakan di awal periode anggaran.
- Kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah ditetapkan di awal.
- Kemampuan pemerintah daerah dalam memilih kebijakan yang sesuai dengan kapasitasnya.
- Kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan anggaran tahun tertentu dengan menimbang pencapaian anggaran di periode sebelumnya.

Fungsi Anggaran

Fungsi Kebijakan Fiskal:

1. Instrumen kebijakan fiskal → anggaran dapat digunakan untuk mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik. Berdasar skala prioritas, pemerintah dapat mengalokasikan nilai belanja tertentu untuk kebutuhan atau kegiatan tertentu.
2. Distribusi → anggaran dapat menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelas sosial, maupun sektoral.
3. Stabilisasi → jika terjadi ketidak seimbangan harga yang sangat ekstrem, misalnya harga bahan pokok, pemerintah bisa melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan tingkat harga pada titik yang rasional. Tingkat pengangguran yang tinggi melalui program-program dalam anggaran pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Fungsi Anggaran (lanjutan)

Fungsi manajemen:

1. Memberi pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya pada periode mendatang.
2. Sebagai produk politik yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif atas nama kepentingan masyarakat dan pembebanan konsekuensi di atas pundak publik, maka anggaran bisa berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat pemerintah.
3. Untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang direncanakan.

Fungsi Anggaran lainnya

1. Data → Anggaran akan berhenti sebagai data jika hanya diperlakukan sebagai kumpulan angka-angka dan dilihat sisi kuantitatifnya saja.
2. Informasi → Anggaran akan bernilai informasi jika kita menggunakannya untuk memahami program-program tertentu dan kontekstualisasinya di masyarakat.
3. Pengetahuan → Anggaran akan bernilai pengetahuan jika kita melalui anggaran mengenali relasi sosial politik atau ideologis antar aktor yang berkepentingan dengan anggaran.

Posisi & Kepentingan Masyarakat dalam Anggaran

Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan dalam konteks keterkaitan antara beban masyarakat sebagai konsekuensi kebijakan anggaran dalam setiap tahapnya mulai dari penyusunan sampai pertanggungjawaban, antara lain:

1. Siapakah yang terlibat dalam tahap-tahap anggaran daerah?
2. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses itu?
3. Apakah tahap-tahap anggaran tersebut ditempuh dengan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat?
4. Seberapa jauh kebijakan anggaran daerah merefleksikan kebutuhan sesungguhnya dalam masyarakat?

(lanjutan)

5. Kepentingan siapakah yang yang paling diuntungkan oleh kebijakan anggaran daerah?
6. Apakah anggaran daerah menjamin pemenuh-an hak-hak dasar masyarakat atau pelayanan publik dari pemerintah?
7. Apakah anggaran daerah menempatkan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan sebagai pilihan pertama yang harus menerima manfaatnya?
8. Dari manakah sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut?
9. Apakah mobilisasi sumber-sumber penerimaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan?

(lanjutan)

10. Apakah pendapatan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel?
11. Adakah konsistensi antara pelaksanaan program pemerintah dengan rencananya yang dikelola melalui mekanisme anggaran?
12. Sejauh mana masyarakat mampu mengontrol pelaksanaan anggaran?
13. Apakah pelaksanaan anggaran mampu menyentuh kelompok-kelompok sasaran dengan tepat?